



**Kerjasama *Economic Community Of West African States (Ecowas)*
dalam Menanggulangi Perompakan Maritim di Teluk Guinea
Tahun 2008 - 2015**

Vito Yanufan Ardi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Geo-economy in Gulf of Guinea threatened by high number of maritime piracy in region. ECOWAS as a regional actor in Gulf of Guinea has responsible to keep its maritime area secure. For combating maritime piracy in Gulf of Guinea, ECOWAS has cooperated internally among the members even with other regional actor (ECCAS) and international actors. This research aims to analyze the effectiveness of of ECOWAS, regional and Global cooperations in combating maritime piracy. This research uses Regional Security Complex theory and States, Powers and Security theory for analyzing the high number of maritime piracy in Gulf of Guinea. This research also uses qualitative method with descriptive-explanative through interview and literature research. However, based from piracy attacks which has not been decreasing yet, huge financial loss from combating piracy, even victims numbers which still on high level, indicating that ECOWAS cooperations for combating piracy in region is not effective yet. Analysis States, Powers and Security suggest ECOWAS as weak states. The weakness of ECOWAS members states in economic, politic and social sectors make maritime piracy flourishing in Gulf of Guinea.

Keywords: *ECOWAS, cooperations, weak states, maritime piracy, Regional Security Complex, Gulf of Guinea*

Pendahuluan

Teluk Guinea merupakan salah satu wilayah perairan yang penting di dunia. Secara geografis, Teluk Guinea merupakan daerah perairan di Afrika Barat yang membentang dari Senegal sampai dengan Angola. Posisi geografis Teluk Guinea dekat untuk lintas Atlantik dari Amerika Selatan dan merupakan jalur transit perdagangan maritim Afrika dari atau menuju Eropa, Timur Tengah dan Asia. Diperkirakan 30 ribu kapal transit di Teluk Guinea setiap tahunnya. Selain sebagai jalur perdagangan maritim, Teluk Guinea kaya akan SDA minyak dan perikananannya. Hampir 70% produksi minyak Afrika berkonsentrasi di kawasan. Bahkan Teluk Guinea mensuplai 40% kebutuhan minyak Eropa dan 29% impor minyak AS (Onuoha, 2014). Kemudian Teluk Guinea mempunyai sektor perikanan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi mendorong industri perikanan di kawasan. Sektor perikanan sangat penting bagi mata pencaharian dan sumber makanan bagi masyarakat miskin di perairan. Contohnya Nigeria, Guinea dan Kongo yang lebih dari 70% penduduknya dalam kemiskinan, perikanan sangat penting bagi sumber pendapatan dan makanan.

Namun kekayaan SDA Teluk Guinea terancam oleh serangan perompakan maritim di kawasan. Whitmen dan Saurez (2012), kemudian Kamal-Deen (2015) mengatakan bahwa

perompakan di Teluk Guinea bersumber dari Nigeria, yang kemudian meluas ke perairan lain di Teluk Guinea, yaitu dari perairan Pantai Gading sampai Angola. Serangan perompakan di Teluk Guinea terpusat pada Nigeria, Benin, Togo dengan total serangan 80% dari keseluruhan Teluk Guinea. Bahkan IMB pada 2012 menetapkan Nigeria, Benin, dan Togo dalam daftar wilayah rawan perompakan (IMB, 2012). Usaha penanggulangan perompakan oleh Nigeria di wilayah perairannya mulai tahun 2010 yang kurang efektif, hanya mendorong perompakan menyebar ke negara tetangga-nya yaitu Benin, Togo, Kamerun dan Pantai Gading.

Perompakan telah berkembang dari masalah keamanan Nigeria menjadi masalah kawasan di Teluk Guinea. Sebagai masalah kawasan, diperlukan aktor kawasan pula untuk mengatasi perompakan di Teluk Guinea. Dalam hal ini, ECOWAS sebagai organisasi keamanan di Teluk Guinea mempunyai tanggung jawab mengatasi permasalahan perompakan di kawasan. Tanggung jawab ECOWAS ditekankan kembali oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang mengeluarkan resolusi 2018 pada tahun 2011 dan 2039 pada tahun 2012 yang mendorong ECOWAS untuk bekerja sama dengan ECCAS dan aktor-aktor internasional untuk melakukan kerja sama mengamankan wilayah maritim Teluk Guinea.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kerja sama yang dilakukan ECOWAS dalam penanggulangan perompakan di Teluk Guinea dan mengetahui sebab dari tingginya angka perompakan di Teluk Guinea dengan menggunakan teori *Regional Security Complex* (RSC) dan teori Negara, Kekuatan dan Keamanan. RSC milik Barry Buzan mengatakan bahwa terdapat keterikatan isu keamanan pada sekelompok negara di kawasan, sehingga diperlukan aktor kawasan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Teluk Guinea merupakan salah satu RSC, sehingga permasalahan perompakan harus ditangani oleh aktor kawasan yaitu ECOWAS. Hal ini menekankan ECOWAS sebagai aktor kawasan yang penting dalam penanggulangan perompakan di Teluk Guinea. Dalam strategi penanggulangan perompakan maritim, ECOWAS bekerja sama dengan ECCAS dan aktor internasional lainnya dengan melakukan peningkatan kapasitas penegakkan hukum, peningkatan kapasitas AL dan polisi maritim, pelatihan dan perlengkapan kemaritiman, operasi maritim bersama. Namun kerja sama yang telah dilakukan kurang efektif, dikarenakan kerja sama ECOWAS hanya berfokus menanggulangi perompakan di wilayah maritim. Padahal Teori Negara, Kekuatan dan Keamanan mengatakan bahwa perompakan bukan semata-mata permasalahan di lautan, melainkan permasalahan di daratan. Untuk menangani perompakan secara efektif, harus melibatkan penanganan permasalahan di daratan.

Pembahasan

Regional Security Complex Teluk Guinea

Sesuai RSC Buzan, masalah keamanan maritim Nigeria berupa perompakan maritim, berdampak pada keamanan maritim negara lain di kawasan. Hal ini dapat diketahui melalui sejarah dan statistik serangan perompak di Teluk Guinea, dimana Nigeria sejak dahulu hingga sekarang menjadi negara di Teluk Guinea yang paling banyak mengalami perompakan (data IMB tahun 2007-2013). Upaya nasional Nigeria berupa patroli AL Nigeria dengan NIMASA sejak tahun 2010 menyebabkan penurunan kasus perompakan di Nigeria. Namun penurunan perompakan di wilayah Nigeria mengakibatkan perompak memperluas wilayah operasinya hingga Benin, Togo, Kamerun bahkan Pantai Gading. Upaya nasional Nigeria belum efektif untuk menanggulangi perompakan di kawasan.

Sebagai permasalahan kawasan, diperlukan aktor kawasan pula untuk menanggulangi perompakan maritim di Teluk Guinea. Bagaimanapun, RSC dari Buzan tidak secara spesifik menjelaskan aktor kawasan yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan

perompakan di Teluk Guinea. Menurut Chatam House (2012), keamanan maritim di Teluk Guinea merupakan tanggung jawab dari organisasi kawasan di Teluk Guinea. ECOWAS dan ECCAS merupakan dua organisasi kawasan yang *supra-governmental*, yang paling menonjol dalam merespon isu perompakan di Teluk Guinea. Bahkan DK PBB mengeluarkan resolusi 2018 pada tahun 2011 dan 2039 pada tahun 2012 yang mendorong ECOWAS dan ECCAS sebagai aktor kawasan untuk melakukan kerja sama mengamankan wilayah maritim Teluk Guinea.

Direktur Jenderal NIMASA, Dr. Dakuku Peterside menginstruksikan agar anggota dari ECOWAS bekerja sama untuk menanggulangi perompakan di Teluk Guinea. Dirjen NIMASA menekankan tanggung jawab bersama seluruh anggota ECOWAS agar kerja sama dapat berjalan. Strategi maritim bersama ECOWAS yang biasa disebut *Integrated Maritime Strategy* (EIMS) dan deklarasi Yaounde tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan di Teluk Guinea dengan jelas menunjukkan peran penting ECOWAS dalam menjamin keselamatan dan keamanan wilayah Teluk Guinea termasuk perairan territorial maupun laut lepas. Tujuan dari instrument tersebut selaras dengan tujuan dari *African Integrated Maritime Strategy* (AIMS) 2050 yang menghasilkan piagam keamanan, keselamatan dan perkembangan di Afrika 15 Oktober 2016.

Dirjen NIMASA menambahkan pentingnya perairan di Teluk Guinea bagi negara-negara ECOWAS sebagai jalur perdagangan maritim dan blue economy. Ditambah dengan mayoritas serangan perompakan di Teluk Guinea yang berpusat di Nigeria, kemudian Benin, dan Togo yang merupakan wilayah ECOWAS. Dengan tingginya angka perompakan di wilayah maritim ECOWAS berdampak secara langsung kepada negara-negara ECOWAS. Hal ini menekankan tanggung jawab ECOWAS sebagai aktor keamanan dalam menanggulangi perompakan maritim di Teluk Guinea.

Kerja Sama Internal dan Eksternal ECOWAS

Kerja sama internal ECOWAS pada dasarnya berupa peningkatan kapasitas penegakkan hukum dan operasi maritim bersama. Operasi maritim bersama negara-negara ECOWAS, yaitu AL Nigeria bersama NIMASA, operasi Farauta, operasi Prosperity, operasi Hot Pursuit, Zona Maritim E, F dan G. Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas penegakkan hukum dan operasi maritim bersama, diperlukan infrastruktur kemaritiman diantaranya hukum maritim dan kapal AL negara-negara ECOWAS.

Sebagian besar negara-negara ECOWAS telah meratifikasi SUA. Dengan meratifikasi SUA, negara-negara ECOWAS mempunyai hukum untuk mengkriminalisasikan setiap tindakan yang mengancam pelayaran, termasuk perompakan maritim. Ditambah lagi seluruh negara ECOWAS telah meratifikasi Yaounde Code of Conduct 2013. Jadi ECOWAS telah mempunyai hukum maritim untuk mengkriminalisasikan perompakan maritim. Dengan ini, negara-negara ECOWAS didorong agar tidak mengalami sindrom *catch and release* pelaku perompak yang berhasil ditangkap. Lebih jauh lagi, dengan ratifikasi Yaounde Code of Conduct 2013, ECOWAS mempunyai kerangka untuk bekerja sama dengan aktor lainnya.

Namun Onuoha (2012) mengatakan kebanyakan negara di kawasan mengalami ketidakseimbangan dalam kekuatan militer, kekurangan pembiayaan dan peralatan untuk melakukan operasi maritim. Osinowo (2015) mengatakan bahwa seluruh kapal AL ECOWAS belum mampu mengamankan perairan ECOWAS dikarenakan kekurangan kapal AL. Bahkan jika setiap kapal patroli dikerahkan untuk mengawasi wilayah maritim seluas 250 mil laut, tetap tidak akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Osinowo menambahkan kapal AL ECOWAS sebagian besar berumur lebih dari 25 tahun, memperbaiki dan memperbarui kapal sangat penting untuk memberantas perompakan (Osinowo, 2015). Berdasarkan pernyataan Onuoha dan Osinowo, kekuatan

angkatan AL negara-negara ECOWAS masih kurang dalam melakukan fungsi pengawasan di perairan. Hal ini membatasi efek dari kerja sama yang dilakukan.

Demi meningkatkan kapasitas penegakkan hukum dan kekurangan kapal AL negara-negara ECOWAS, ECOWAS bekerja sama dengan aktor-aktor lainnya. ECOWAS melakukan kerja sama dengan aktor kawasan lainnya yaitu ECCAS, kemudian bekerja sama dengan aktor internasional diantaranya AS, Perancis, Inggris UNODC, UNOWA, INTERPOL dan UE. Dalam tingkat kawasan, ECOWAS bekerja sama dengan ECCAS yang menghasilkan Yaounde Code of Conduct 2013. Yaounde Code of Conduct menjadi instrumen penting bagi ECOWAS dalam penanggulangan perompakan maritim di kawasan. Didalam Yaounde Code of Conduct terdapat strategi dan kerangka kerja sama penanggulangan perompakan di Teluk Guinea.

Inisiasi AL asing berfokus pada aspek militer dan keamanan diantaranya peningkatan kapasitas AL dan polisi maritim, memberikan pelatihan dan perlengkapan kemaritiman dibandingkan kegiatan penegakkan hukum kemaritiman. Inisiasi AL asing di Teluk Guinea diantaranya AS, Perancis dan Inggris. AS melalui AFRICOM membantu meningkatkan kapasitas AL negara-negara di Teluk Guinea. Didalam proyeknya, AFRICOM melakukan pelatihan masal Obangame, mendonasikan kapal dan alat keamanan maritim melalui APSI, meningkatkan kapasitas hukum kemaritiman negara di kawasan dengan AMLEP. Perancis melalui *Operation Corymbre*, mengadakan pelatihan maritim dan mempromosikan keamanan di kawasan. Melalui ASECMAR, Perancis membantu bekas negara jajahannya secara bilateral, diantaranya bantuan pembuatan strategi keamanan maritim, melatih masyarakat sipil dan tentara negara ECOWAS yakni Benin, Togo, Ghana, Nigeria, Pantai Gading, dan Guinea. Inggris membantu membuat kebijakan maritim, mendanai pelatihan petugas keamanan maritim, dan mendanai seminar keamanan maritim ECOWAS. Bantuan bilateral pada OCIMF, dan MTISC.

Institusi internasional bekerja sama dengan ECOWAS dengan meningkatkan kapasitas aktor maritim dan penegakkan hukum kemaritiman. Institusi internasional yang bekerja sama dengan ECOWAS diantaranya UNODC, UNOWA, INTERPOL dan UE. IMO membantu ECOWAS dan ECCAS membentuk bangunan kemaritiman kawasan diantaranya MOWCA dan implementasi Yaounde Code of Conduct diantaranya ICC dan MTISC-GoG. Kerja Sama yang dilakukan Uni Eropa berupa bantuan pembentukan bangunan kemaritiman di kawasan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kawasan diantaranya merupakan program CRIMGO. UNODC meningkatkan kapasitas hukum kemaritiman ECOWAS (Togo, Benin, Nigeria dan Gabon). UNODC membantu ECOWAS, ECCAS dan GGC dalam membangun dan mengadopsi strategi maritim menghadapi perompakan. Bersama UNODC, UNOWA membantu ECOWAS, ECCAS dan GGC dalam membangun dan mengadopsi strategi maritim menghadapi perompakan. Kerja Sama INTERPOL berusaha meningkatkan kapasitas polisi di ECOWAS dalam investigasi kejahatan perompakan dengan pelatihan kapasitas diantaranya proyek AGWE, seminar dan pelatihan table-top, program Hostage Debriefing.

Kerja sama ECOWAS dengan aktor-aktor lainnya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman ECOWAS agar dapat menanggulangi perompakan di Teluk Guinea. Setelah kerja sama dilakukan, diharapkan negara-negara ECOWAS mempunyai hukum kemaritiman dan AL yang memadai untuk menindak perompakan. Pada akhirnya perompakan dan ancaman-ancaman maritim di kawasan akan menurun. Namun, berdasarkan angka perompakan yang belum menurun, kerja sama penanggulangan perompakan di kawasan bisa dikatakan belum efektif. Padahal ECOWAS beserta kerja sama yang dilakukan pada tahun 2008 hingga 2015 telah mengeluarkan biaya yang besar. Ditambah lagi, selama tahun 2012 hingga 2015, terdapat lima ribu pelaut diserang perompak dan peningkatan kasus penyanderaan untuk dimintai tebusan. Perompakan di

kawasan memakan korban jiwa paling banyak pada tahun 2015 dengan 23 korban meninggal, paling banyak pula dibandingkan perompakan di kawasan lainnya.

Hambatan ECOWAS sebagai Negara-Negara Lemah

Negara lemah, dalam konteks keamanan, mengalami kesulitan dalam menangani ancaman luar maupun dalam negaranya. Negara lemah memiliki permasalahan yang menyebabkan perompakan marak terjadi pada wilayah maritimnya (Whitman & Saurez, 2012; Murphy, 2013; Pins, 2014). Karakteristik dari kawasan Teluk Guinea yang lemah menciptakan lingkungan bagi berkembangnya sindikat kejahatan terorganisir, dalam hal ini merupakan perompakan maritim.

Meija (2012) mengatakan bahwa perekonomian yang sulit, kemiskinan dan ketidakstabilan sosio-politik dari negara lemah menyebabkan perompakan. Dalam penelitiannya, Meija menggunakan GDP perkapita untuk mengukur perekonomian dan tingkat kebebasan untuk mengukur sosio-politik negara lemah yang terpengaruh perompakan. Meija menyimpulkan bahwa rata-rata negara tanpa perompakan mempunyai GDP perkapita 10.000 dollar AS, dan negara dengan GDP perkapita 4.400 dollar AS mengalami satu hingga lima serangan perompak, sementara negara dengan GDP 1.800 dollar AS mengalami lebih dari lima serangan. Kemudian tingkat kebebasan sipil dan politik negara tanpa perompakan adalah 1.71 dan negara yang mengalami lebih dari lima perompakan adalah 2.19.

Rata-rata GDP perkapita negara ECOWAS adalah 1098.7 Dollar AS, jauh dibawah rata-rata GDP perkapita dunia yaitu 10.000 Dollar AS. GDP perkapita ECOWAS yang rendah merupakan cerminan dari perekonomian yang sulit dan kemiskinan. Dalam konteks perompakan, GDP perkapita yang rendah menyebabkan perompakan masih marak terjadi di kawasan. Kemudian tingkat kebebasan negara-negara ECOWAS adalah 3.3, menunjukkan bahwa sebagian besar negara ECOWAS belum sepenuhnya memberikan hak politik dan sipil terhadap rakyatnya. Ditambah lagi dengan tingkat korupsi yang tinggi (skor 35.5 dari 100), membentuk kondisi sosio-politik yang mendorong perompakan.

Whitman dan Saurez (2015) mengatakan keterkaitan antara kelemahan ekonomi, sosial dan politik yang menjadi penyebab perompakan di Teluk Guinea. Faktor ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran merupakan dampak dari pemerintahan yang buruk dan korupsi. Ketika negara tidak mampu menyediakan solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat, terbentuk gerakan pemberontakan dan jaringan perompakan. Whitman dan Saurez menambahkan bahwa pendorong bagi tindakan perompakan di Teluk Guinea merupakan kemiskinan Negara-negara ECOWAS mempunyai GDP perkapita yang rendah, hal ini menunjukkan kemiskinan di kawasan.

Angka korupsi yang tinggi dan kurangnya transparansi manajemen minyak menjadi pendorong perompakan sekaligus hambatan terhadap kerja sama penanggulangan perompakan di kawasan. Korupsi menyebar ke Pemimpin politik, pasukan keamanan, industri minyak, AL, administrasi kemaritiman dan badan penegak hukum. Lucia (2015) mengatakan bahwa sangat sulit untuk menangkap dan menghukum perompak di kawasan bila aktor yang terlibat dilindungi oleh pejabat publik. Korupsi, kesenjangan dan kerusakan lingkungan mendorong masyarakat frustrasi kepada negara dan perusahaan minyak.

Tingkat kebebasan hak sipil dan politik negara-negara ECOWAS yang masih rendah. Tanpa adanya kebebasan, masyarakat tidak bisa mengungkapkan aspirasi dengan mudah. Rasa frustrasi masyarakat membuat kondisi sosial yang mendukung perompakan demi mendapatkan pembagian kekayaan negara. Permasalahan sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh pemerintahan yang buruk membentuk gerakan pemberontakan MEND. Pada mulanya MEND menggunakan kekerasan melawan negara untuk mendapatkan tututannya berupa pendistribusian hasil minyak yang lebih merata. Namun sekarang tujuan MEND berubah

dari tuntutan pembagian kekuasaan, menjadi kebalikannya, yaitu memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan perompakan. Bahkan upaya kejahatan pemberontak, khususnya MEND mendapatkan dukungan dari masyarakat perairan.

ECOWAS tergolong kumpulan negara-negara lemah berdasarkan kelemahan ekonomi, tingkat kebebasan yang rendah, dan tingkat korupsi yang tinggi. Permasalahan pada bidang ekonomi, sosial dan politik diatas mengakibatkan perompakan dapat berkembang di kawasan. Sementara, kerja sama internal maupun eksternal yang dilakukan ECOWAS pada dasarnya berupa peningkatan kapasitas penegakkan hukum, peningkatan kapasitas AL dan polisi maritim, pelatihan dan perlengkapan kemaritiman, operasi maritim bersama. Semua kerja sama yang telah dilakukan ECOWAS hanya berfokus menanggulangi perompakan di wilayah maritim. Padahal perompakan bukan semata-mata permasalahan di lautan, melainkan permasalahan di daratan. Untuk menangani perompakan secara efektif, harus melibatkan penanganan permasalahan di daratan.

International Crisis Group (ICG) pada laporannya di tahun 2012 mengatakan bahwa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman. Namun terlalu menekankan isu perompakan sebagai permasalahan keamanan di maritim semata, tanpa menempatkan perompakan sebagai kejahatan terorganisir dan gejala permasalahan di daratan membuat kerja sama kurang efektif. ICG menambahkan bahwa kerja sama dalam menanggulangi perompakan di wilayah maritim merupakan prioritas, namun kerja sama hendaknya mengikutsertakan strategi mengatasi akar penyebab terjadinya perompakan. Kebijakan jangka panjang sangat diperlukan untuk memperbaiki perekonomian khususnya didaerah perairan Nigeria sebagai sumber perompak.

Faktanya, kerja sama yang telah dilakukan ECOWAS mengabaikan penanggulangan permasalahan di daratan. Lucia (2015) mengatakan bahwa salah satu instrument ECOWAS dalam penanggulangan perompakan yang paling penting, yaitu Yaounde Code of Conduct, tidak mencakup penanggulangan akar-akar dari perompakan diantaranya buruknya sosio-ekonomi, korupsi dan pemerintahan yang buruk.

Kesimpulan

Berdasarkan sejarah dan statistik, perompakan maritim di Teluk Guinea berasal dari perairan Nigeria. Dikarenakan karakteristik RSC, perompakan di Nigeria mempunyai dampak di seluruh kawasan Teluk Guinea, dan bahkan dampak Internasional. Bagi negara-negara di kawasan, perompak telah mengembangkan taktik, lingkup dan tren serangan yang meluas hingga perairan Benin, Togo, bahkan Pantai Gading yang berjarak ribuan km. Bagi aktor internasional, perompakan di Teluk Guinea mengganggu jalur pelayaran dan eksploitasi minyak di kawasan. Perhatian Internasional pada permasalahan perompakan dapat dilihat dari dua resolusi yang dikeluarkan DK PBB, diantaranya resolusi 2018 tahun 2011 dan 2039 tahun 2012 yang mendorong agar organisasi kawasan yaitu ECOWAS dan ECCAS bersama-sama mengatasi perompakan di Teluk Guinea.

Direktur Jenderal NIMASA, Dr. Dakuku Peterside menekankan pentingnya peran ECOWAS dalam menanggulangi perompakan di Teluk Guinea. EIMS dan deklarasi Yaounde tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan di Teluk Guinea dengan jelas menunjukkan peran penting ECOWAS dalam menjamin keselamatan dan keamanan wilayah Teluk Guinea termasuk perairan territorial maupun laut lepas. Tujuan dari instrument tersebut selaras dengan tujuan dari *African Integrated Maritime Strategy* (AIMS) 2050 yang menghasilkan piagam keamanan, keselamatan dan perkembangan di Afrika 15 Oktober 2016. Dirjen NIMASA menambahkan pentingnya perairan di Teluk Guinea bagi negara-negara ECOWAS sebagai jalur perdagangan maritim dan *blue economy*. Ditambah dengan mayoritas serangan perompakan di Teluk Guinea yang berpusat di Nigeria, kemudian Benin, dan Togo yang merupakan wilayah ECOWAS.

Dengan tingginya angka perompakan di wilayah maritim ECOWAS berdampak secara langsung kepada negara-negara ECOWAS. Hal ini menekankan tanggung jawab ECOWAS sebagai aktor keamanan dalam menanggulangi perompakan maritim di Teluk Guinea.

Dalam menangani perompakan di Teluk Guinea, ECOWAS melakukan kerja sama internal anggota kemudian bekerja sama dengan ECCAS dan aktor di luar kawasan diantaranya AS, Perancis, Inggris kemudian institusi internasional dibawah PBB diantaranya UNODC, UNOWA, INTERPOL dan EU. Kerja sama internal ECOWAS pada dasarnya berupa peningkatan kapasitas penegakkan hukum dan operasi maritim bersama. Inisiasi AL asing berfokus pada aspek militer dan keamanan diantaranya peningkatan kapasitas AL dan polisi maritim, memberikan pelatihan dan perlengkapan kemaritiman dibandingkan kegiatan penegakkan hukum kemaritiman. Institusi internasional bekerja sama dengan ECOWAS dengan meningkatkan kapasitas aktor maritim dan penegakkan hukum kemaritiman.

Setelah kerja sama yang dilakukan ECOWAS dengan aktor-aktor lainnya pada tahun 2008 hingga 2015, peneliti mengukur dampak kerja sama berdasarkan angka kasus, kerugian ekonomi dan perompakan di Teluk Guinea. Angka perompakan selama tahun penelitian yaitu 2008 hingga 2015 belum menurun, padahal ECOWAS beserta kerja sama yang dilakukan pada tahun 2012 hingga 2015 telah mengeluarkan biaya yang besar. Ditambah lagi, selama tahun 2012 hingga 2015, jumlah pelaut yang terkena dampak serangan perompakan masih tinggi dan peningkatan kasus penyanderaan untuk dimintai tebusan. Jadi kerja sama penanggulangan perompakan di kawasan bisa dikatakan belum efektif.

Teori Negara, Kekuatan dan Keamanan menunjukkan terdapat keterikatan antara kekuatan maupun kelemahan negara-negara ECOWAS dalam menghadapi perompakan maritim di Teluk Guinea. ECOWAS tergolong kumpulan negara-negara lemah berdasarkan GDP perkapita yang rendah, tingkat kebebasan yang rendah, dan tingkat korupsi yang tinggi. GDP perkapita yang rendah menunjukkan permasalahan ekonomi yang mendorong terjadinya perompakan di kawasan. Keterlibatan pejabat-pejabat tinggi dalam kegiatan pencurian minyak menunjukkan korupsi yang parah di kawasan, menghambat kerja sama penanggulangan perompakan. Tingkat kebebasan sipil-politik yang rendah membuat masyarakat frustrasi dikarenakan tidak mampu mendapatkan tuntutan akan kesejahteraan, khususnya di perairan Nigeria. Ketika negara tidak mampu menyediakan solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat, terbentuk gerakan pemberontakan dan jaringan perompakan. Permasalahan pada bidang ekonomi, sosial dan politik diatas mengakibatkan perompakan dapat berkembang di kawasan.

Sementara kerja sama yang telah dilakukan ECOWAS hanya berfokus menanggulangi perompakan di wilayah maritim. Padahal perompakan bukan semata-mata permasalahan di lautan, melainkan permasalahan di daratan. Untuk menangani perompakan secara efektif, harus melibatkan penanganan permasalahan di daratan.

Referensi:

- Buzan, Barry. (1983). *People, States, and Fear The National Security Problem in International Relations*. Great Britain: Harvester Press.
- Charlebois, Jamie. (2012). *Pirate Economics: The Economic Causes and Consequences of Contemporary Maritime Piracy in Sub-Saharan Africa*. Thesis. Master of Development Economics At Dalhousie University Halifax, Nova Scotia.
- Rinsley, M.G. (2014). *Maritime Security in the Gulf of Guinea: Issues and Solutions for the 21st Century*. Disertasi. Master Ilmu Politik dan Hubungan Internasional (spesialisasi di Globalisasi dan Lingkungan), Universidade Nova de Lisboa.

- Osinowo, Adeniyi Adejimi. (2015). "Combating Piracy in Gulf of Guinea", *African Center for Strategic Studies*. No. 30 February 2015.
- Kamal-Deen, A. (2014). "The Anatomy of Gulf of Guinea Piracy". *Review Naval War College*, Winter 2015, Vol. 68, No. 1.
- Marine Affairs Policy Forum. (2013). "The Influence of State Weakness and State Failure on Marine Piracy", *MAP Policy Forum*. Volume 5, Issue 2. <http://dmpp.management.dal.ca>.
- Ukeje, Charles and Ella, Wullson Mvomo. (2013). African Approaches to Maritime Security-Gulf of Guinea. *Friedrich Ebert Stiftung Paper*.
- Lucia, Elisa Lopez. (2015). Fragility, Violence and Criminality in the Gulf of Guinea. (*Rapid Literature Review*). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.
- Freedom C. Onuoha. (). Oil Piracy in the Gulf of Guinea. *Centre of Strategic Research and Studies*.
- Chatham House. (November 2012). *Angola and the Gulf of Guinea Towards and Integrated Maritime Strategy*, Dilaporkan pada Angola Forum Conference diatas HMS Dauntless di Luanda, Angola (29 Juni 2012).
- Fund For Peace. (2013). *The Failed States Index Rankings 2013*, www.fundforpeace.org.
- International Crisis Group. (2012). *The Gulf of Guinea: The New Danger Zone*. Crisis Group Africa Report N°195, 12 December 2012.
- KPMG Africa. (2013). Oil and Gas in Africa: Africa's Reserves, Potential and Prospects, KPMG International.
- M. Q. Mejia Jr. (2012). *Maritime Piracy a multi-dimensional issue*, World Maritime University.
- Oceans Beyond Piracy. (2012). *The Human Cost of Maritime Piracy 2012*, One Earth Future Foundation.
- Oceans Beyond Piracy. (2013). *The State of Maritime Piracy 2013*, One Earth Future Foundation.
- Oceans Beyond Piracy. (2014). *The State of Maritime Piracy 2014*, One Earth Future Foundation.
- Onuoha F.C. (2012). *Piracy and Maritime Security in the Gulf of Guinea: Nigeria as a Microcosm*, Al Jazeera Centre for Studies.
- Whitman, S. & Saurez, C. (2012). *Dalhousie Marine Piracy Project: The Root Causes and True Costs of Marine Piracy*, Laporan Marine Affairs Program #1. <http://marineaffairsprogram.dal.ca/Publications>
- Energy Information Administration. Online. "Annual Report International Energy Statistics 2011". Dalam <<http://www.eia.gov>>, diakses pada 20 Juni 2015 pukul 21.00 WIB.
- International Maritime Organization. Online. "Annual Report 2008-2016". Dalam <<http://www.imo.org>>, diakses pada 25 Juni 2015 pukul 21.30 WIB.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries. (2012). "Annual Statistical Bulletin". Dalam <http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012.pdf>, diakses pada 25 Juni 2015 pukul 20.00 WIB.
- Oceans Beyond Piracy. 2015. "Piracy and Robbery Against Ships in the Gulf of Guinea: 2015". Dalam <<http://oceansbeyondpiracy.org/reports/sop2015/west-africa#humancostwa>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.
- UNODC. 2014. "Maritime Crime Programme - West Africa". Dalam <<https://www.unodc.org/unodc/en/piracy/west-africa-division.html>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.

- Prins, Brandon. 2014. "What Drives Maritime Piracy in Sub-Saharan Africa?". Dalam <<http://piracy-studies.org/what-drives-maritime-piracy-in-sub-saharan-africa/>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.
- Vreÿ, Francois. 2016. "Maritime insecurity in the Gulf of Guinea: Threats, vulnerabilities and opportunities". Dalam <<http://www.howwemadeitinafrica.com/maritime-insecurity-gulf-guinea-threats-vulnerabilities-opportunities/56080/>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.
- Freedom House. 2015. "Freedom in the World 2016". <<https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.
- Transparency International. 2015. "Corruption Perceptions Index 2015". Dalam <<https://www.transparency.org/cpi2015/>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.
- World Bank. 2015. "GDP per capita 2015". Dalam <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>>, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.
- Osinowo, Adeniyi Adejimi. 2015. "Combating Piracy in the Gulf of Guinea". Dalam <<http://www.dryadmaritime.com/combating-piracy-gulf-guinea/>>, Diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB.